KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Sudah Terima Surpres dan DIM Tiga RUU DOB Papua
Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

DPR sudah Terima Surpres dan DIM Tiga RUU DOB Papua

PEMBAHASAN tiga rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Papua akan segera dimulai. Pasalnya DPR sudah menerima surat presiden (surpres) pembahasan tiga bakal beleid tersebut.

"Saya sudah pegang tembusannya (surpres terkait dengan pembahasan tiga RUU DOB Papua)," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Jakarta, kemarin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu menyampaikan surpres itu akan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan (rapim) lalu ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Tentunya itu akan disahkan (dibacakan) dalam rapat paripurna terdekat," ungkap dia.

Selain surpres, DPR telah menerima daftar inventaris masalah (DIM) tiga RUU DOB Papua. Anggota Komisi I DPR itu menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan sejumlah kementerian/lembaga membahas tiga RUU itu. Mereka ialah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Yang tidak kalah pentingnya Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," sebut Lodewijk.

Lodewijk menyebut pembahasan tetap dilakukan meski diprotes sebagian pihak. Menurut dia, sikap pro dan kontra itu bagian dari aspirasi yang akan dibahas DPR dan pemerintah. "Ya, itu (penolakan), kan, namanya aspirasi. (Keinginan) orang, kan, macam-macam. Kita tampung maunya apa dan kita akan bahaslah pada kegiatan selanjutnya," ujar dia.

Anggota Komisi II DPR Rifqynizami Karsayuda saat dihubungi mengatakan pihaknya mendorong penyelesaian pembahasan itu secepatnya karena terkait dengan persiapan Pemilu 2024. Dengan demikian, efisiensi waktu sangat dibutuhkan agar persiapan pemilu tidak tergesa-gesa.

"Kami ingin segera karena ini berkorelasi dengan persiapan pemilu seperti penetapan jumlah pemilih, pembentukan DPRD-nya, juga lain-lain. Jadi, waktunya harus efisien," ujarnya, kemarin.

Pada dasarnya DPR juga menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan *judicial review* UU Otsus Papua. "Ini komitmen pimpinan DPR dan itu akan digagas secara institusi dan dibahas di Komisi II," tambah Rifqynizami.

Sejak awal DPR telah memitigasi agar Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak mempersalahkan tiga RUU DOB Papua, salah satunya dengan melibatkan MRP dalam pembahasan.

"Ini sebagai bentuk gotong royong dalam konteks Papua. Ini soal Papua dan kami harus menghormati semua pihak, termasuk MRP yang sekarang sedang *judicial review* ke MK," ungkapnya. (Atm/Sru/P-5)